

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku:

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002).

Aman, Edy Putra Tje'. *Kredit Perbankan: Suatu Tindakan Yuridis*. (Yogyakarta: Liberti, 1989).

Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).

Badruzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Kredit Bank*. Cet. 5. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991).

Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Butar-butar, Elisabeth Nurhaini. *Hukum Harta Kekayaan: Menurut Sistematisasi KUH Perdata dan Perkembangannya*. (Bandung: Refika Aditama, 2012).

Djumha, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993).

Fuady, Munir. *Hukum Jaminan Utang*. (Jakarta: Erlangga, 2013).

Gunawan, Johannes. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*. Cet. 4. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).

Harahap, M. Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. (Bandung: Alumni, 2002).

Hartanto, J. Andy. *Hukum Jaminan dan Kepailitan: Hak Kreditor Separatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*. (Surabaya: Laksbang Justitia, Januari 2015).

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Cet. 4. (Jakarta: Kencana, 2008).

HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).

Isnaeni, Moch. *Hukum Jaminan Kebendaan: Eksistensi, Fungsi, dan Pengaturan*. (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016).

J.L. Kriekhoff, Valerine. *Metode Penelitian Hukum*. (Depok: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

Kantaatmadja, Mieke Komar. *Lembaga Jaminan Kebendaan Pesawat Udara Indonesia Ditinjau dari Hukum Udara*. (Bandung: Alumni, 1989).

Kartono. *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982).

Lontoh, Rudhy A., Denny Kailimang, & Benny Ponto. *Penyelesaian Utang-piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Cet. 1. (Bandung: Alumni, 2001).

Mahadi. *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*. (Bandung: Alumni, 2003).

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2008).

Meliala, Djaja S. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Cet. 4. (Bandung: Nuansa Aulia, 2014).

Naja, Daeng. *Hukum Kredit dan Bank Garansi: The Banker's Hand Book*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).

Nating, Imran. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Cet. 4. (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005).

Poesoko, Herowati. *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).

Rahman, Hasanuddin. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Cet. 2. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998).

Republik Indonesia, Mahkamah Agung. *Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara kepailitan*. Cet. 1. (Jakarta: Tatanusa, 2000).

Ridho, R. Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. (Bandung: Alumni, 2001).

Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Cet. 1. (Bandung: Alumni, 2006).

Satrio, J. *Hukum Perjanjian*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992).

_____. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Cet. 1. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).

_____. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Cet. 4. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

_____. *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi: Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung*. Cet. 2. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003),

Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan*. (Bandung: Mandar Maju, Oktober 2012).

Sinaga, Syamsuddin M. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Cet. 1. (Jakarta: Tatanusa, 2012).

Sitompul, Zulkarnain. *Problematisa Perbankan*. Cet. 1. (Bandung: Books Terrace & Library, 2005).

Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002).

_____. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010).

_____. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Cet. 1. (Jakarta: Prenadamedia, 2016).

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI-Press, 1986).

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. (Yogyakarta: Liberty, 1980).

Soerjopratikno, Hartono. *Hutang-piutang Perjanjian-perjanjian Pembayaran dan Jaminan Hypotik*. (Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1984).

Subekti, R. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Cet. 5. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).

_____. *Aneka Perjanjian*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).

_____. *Hukum Perjanjian*. Cet. 19. (Jakarta: PT Intermasa, 2002).

Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan – Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Cet. 1. (Jakarta: Kencana, 2008).

Sunarni. *Hukum Kepailitan*. Edisi 2. (Jakarta: Sofmedia, 2010).

Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Cet. 2. (Jakarta: Djambatan, 1997).

Supriyono, Maryanto. *Buku Pintar Perbankan*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2011).

Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. (Jakarta: Alfabeta, Oktober 2005).

Sutedi, Adrian. *Hukum Hak Tanggungan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),

Sutojo, Siswanto. *Analisa Kredit Bank Umum: Konsep & Teknik*. (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1995).

Suyatno, Anton. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. (Jakarta: Pramedia Group, 2016).

Syahrani, Riduan. *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum*. (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).

Triandaru, Sigit. Totok Budisantoso. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Cet. 4. (Jakarta: Salemba Empat, 2007).

Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Cet. 2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Weng, Lee A. *Tinjauan Pasal demi Pasal Fv (Faillissements-Verordening) S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No. 348 jis Perpu No. 1 Tahun 1998 dan Undang-undang No. 4 Tahun 1998*. (Medan: 2001).

Widjaja, Gunawan. Kartini Mulyadi, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003).

Widjanarto, *Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan*. Cet. 1. (Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi, 1998).

Widyawan, Ignatius Ridwan. *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit* Cet. 1. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997).

Wiyono, Try. *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).

Yani, Ahmad. Gunawan Widjaja. *Kepailitan*. Cet. 2. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).

Yasabari, Nasroen. Nina Kurnia Dewi, *Penjaminan Kredit: Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*. (Bandung: Alumni, 2007).

II. Bunga Rampai:

Erman Rajagukguk, “Latar Belakang dan Ruang Lingkup UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.” Dalam Rudhi A. Lontoh, ed. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Bandung: Alumni, 2001), 524

Fred BG.Tumbuan, “Kepailitan dan PKPU dikaitkan dengan Kedudukan Hukum Guarantor.” Dalam Rudhi A. Lontoh, ed. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001), 128.

Fred BG Tumbuan, “Pokok-pokok Undang-undang tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah Oleh Perpu No.1/1998.” Dalam Rudhi A. Lontoh,

ed. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, 2001, 128.

Jerry Hoff, "*Indonesian Bankruptcy Law*." Dalam Gregory J. Churchill, ed. Jakarta: PT. Tatanusa, 1999, 11.

Kartini Muljadi, "Actio Pauliana dan Pokok-pokok tentang Pengadilan Niaga." Dalam Rudhi A. Lontoh, ed., *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, 2001, 301.

Thomas Suyatno, "Bank Indonesia, Bank Tidak Sehat, BPPN, dan Masalah Kepailitan." Dalam Rudhi A. Lontoh, ed. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, 2001, 455.

III. Karya Terjemahan:

Hoff, Jerry. *Undang-undang Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, terjemahan Kartini Muljadi. Jakarta: PT Tatanusa, 2000.

IV. Makalah Ilmiah:

J. Djohansah, "*Kreditor Separatis dan Preferen, serta tentang Penjaminan Hutang*". Makalah disampaikan pada Lokakarya Kepailitan dan wawasan hukum bisnis lainnya, Jakarta, 11-12 Juni 2002.

Hutagalung, Arie S. "*Jaminan-Jaminan Kredit*". Makalah yang dibawakan pada Pelatihan Kurator Kepailitan, PPLIH, Jakarta, 10 April 2000.

Hutagalung, Arie S. "*Transaksi Berjaminan*". Makalah yang dibawakan pada perkuliahan, program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Tansah, Elijana. "*Kapita Selekta Hukum Kepailitan*". Makalah yang dibawakan dalam Pendidikan Singkat Hukum Perusahaan, Jakarta, 17 Juli - 4 Agustus 2000.

Tansah, Elijana. "*Akibat Putusan Pernyataan Pailit*". Makalah dibawakan pada Pendidikan Kurator dan Pengurus Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, AKPI, Jakarta, 26 November - 7 Desember 2007.

Hutapea, Duma. “*Pemberesan Harta Pailit (Bagian Kedua)*”. Makalah dibawakan pada pada Pendidikan Kurator dan Pengurus Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, AKPI, Jakarta, 26 November - 7 Desember 2007.

V. Internet:

S, Khrisna. “Teori Kepastian Hukum” (on-line), tersedia di <http://skripsifakhukum.blogspot.co.id/2015/01/teori-kepastian-hukum.html> (22 Februari 2016).

VI. Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek—BW*).

Faillissementsverordening. *Staatblad* 1906 No. 217 *Juncto Staatblad* 1906 No. 348.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.